

## **BAB III**

### **PAJAK HOTEL DAN USAHA PERHOTELAN DI KABUPATEN BADUNG**

#### **3.1 Pajak Hotel di Kabupaten Badung**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, memisahkan jenis pajak antara pajak Propinsi dengan Pajak Kabupaten/kota sebagai berikut :

- (1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  - g. Pajak Parkir.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ini dijabarkan kembali di masing-masing kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah. Pajak Hotel sendiri, di Kabupaten Badung dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel. Menurut Pasal 1 poin g Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel dan/atau tempat menginap lain yang sejenis. Lebih lanjut, dalam poin h dijelaskan bahwa hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran atau yang seharusnya dibayar, termasuk bangunan lainnya yang

menyatu, termasuk rumah sewa/kos dan/atau yang diperuntukkan untuk itu kecuali pertokoan dan perkantoran. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib Pajak adalah pengusaha hotel. Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dan atau yang seharusnya dibayar di hotel atau yang diperuntukkan untuk itu. Yang termasuk Obyek Pajak antara lain :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain ; Hotel Berbintang, Hotel Melati, gubuk wisata (*cottage*) motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost/rumah sewa dan yang sejenisnya;
2. Fasilitas pelayanan penunjang antara lain : telepon, faximile, telex, restoran bar, pelayanan cuci, strika, dan seluruh transaksi sejenis lainnya;
3. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain : pusat kebugaran (*fitness center*), spa, kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotek, dan lain-lain yang disediakan atau dikelola hotel;
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Yang dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

1. Asrama dan Pesantren;
2. Perkantoran, perbankan, dan pertokoan.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran dan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh konsumen kepada Hotel dengan tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak hotel.

### **3.2. Letak, Luas, dan Batas Kabupaten Badung**

Kabupaten Badung adalah salah satu dari delapan kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Badung terletak di Bali Selatan yang memiliki luas 418.652 kilometer persegi atau hanya 7,43% dari luas Provinsi Bali, dengan letak geografis 8°14'17" - 8°50'57" Lintang Selatan dan 115°05'02" - 115°16'09" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 00 – 2075 meter dari permukaan laut. Berikut adalah gambar Kabupaten Badung :



Gambar 3.1. Peta Prov. Bali dan Kab. Badung (kiri), Peta Kab. Badung (kanan)

Sumber : [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Kabupaten Badung dibatasi oleh wilayah antara lain :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.

### 3.3 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Badung

Jumlah wisatawan asing yang menginap di Kabupaten Badung dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 terus mengalami penurunan dari 1.412.839 orang menjadi 988.202 orang, sedangkan pada tahun 2004 mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara cukup tajam menjadi sebesar 1.457.565 orang. Untuk penurunan jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2003 cukup dimengerti karena terjadinya peristiwa Bom Bali I pada bulan Oktober 2002 di daerah Kuta, yang cukup banyak menewaskan wisatawan asing. Untuk tahun 2005 dan 2006, kembali terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan kembali terulangnya peristiwa Bom Bali II, di bulan Oktober 2005, juga terjadi di daerah Kuta. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Badung di tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 1.386.448 orang dan 1.260.270. Pada tahun 2007, sektor pariwisata kembali pulih seperti semula, yang ditandai dengan meningkatnya wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Badung. Jumlah

kunjungan wisatawan asing di tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 1.668.531 orang dan 1.992.299 orang. Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di Kabupaten Badung dapat dilihat dari Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap di Kabupaten Badung Tahun 2000 – 2008

Tahun	M mancanegara (Orang)
2000	1.412.839
2001	1.353.117
2002	1.285.842
2003	988.202
2004	1.457.565
2005	1.386.448
2006	1.260.270
2007	1.668.531
2008	1.992.299

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Badung Dalam Angka

Wisatawan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara yang menginap di Kabupaten Badung sangat besar pengaruhnya terhadap Pajak Hotel. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di Kabupaten Badung tiap tahunnya terus meningkat, kecuali periode tahun 2001 - 2003 dan periode tahun 2005 - 2006 yang diakibatkan adanya peristiwa Bom Bali I di bulan Oktober 2002, dan peristiwa Bom Bali II juga di bulan Oktober tahun 2005, yang keduanya terjadi di daerah Kuta, Kabupaten Badung. Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap dan dibarengi dengan lamanya wisatawan itu menginap akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel. Makin banyak dan makin lama wisatawan yang menginap di hotel-hotel yang ada di Kabupaten Badung akan menyebabkan makin besar pula uang yang mereka keluarkan untuk membiayai hotel dan jasa pelayanan, dan sepuluh persen dari uang yang dikeluarkan merupakan penerimaan Pajak Hotel.

Wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Badung dikelompokkan menjadi tujuh negara asal wisatawan, yaitu Asia dan Pasifik, Eropa, Amerika, Asean, Afrika, Timur Tengah, dan Negara Lainnya. Di tahun 2008 data statistik menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara terbanyak yang berkunjung ke Kabupaten

Badung berasal dari Jepang, disusul oleh Australia di urutan kedua, Taiwan di urutan ketiga, Malaysia di urutan keempat, serta Inggris dan Jerman di urutan kelima (selengkapnya dapat dilihat di Tabel 1.1.).

Wisatawan domestik juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam penerimaan Pajak Hotel, meskipun tidak se-dominan wisatawan asing. Perbandingan wisatawan asing dan domestik (lokal) yang menginap di Kabupaten Badung pada hotel berbintang dan non bintang cukup jauh di mana pada tahun 2000 wisatawan asing yang menginap pada hotel berbintang sebanyak 86,23% dan untuk hotel non bintang sebanyak 77,54%. Sedangkan jumlah wisatawan dalam negeri atau lokal yang menginap di hotel berbintang hanya sebanyak 13,77% dan yang menginap di hotel non bintang jumlahnya lebih banyak, yaitu sebesar 22,46%. Sedangkan untuk tahun 2008, perbandingan wisatawan asing dan domestik (lokal) yang menginap di Kabupaten Badung pada hotel berbintang dan non bintang tidak sejauh seperti yang terjadi di tahun 2000 dimana pada tahun 2008 wisatawan asing yang menginap pada hotel berbintang sebanyak 77,09% dan untuk hotel non bintang sebanyak 63,99%. Sedangkan jumlah wisatawan dalam negeri atau lokal yang menginap di hotel berbintang hanya sebanyak 22,91% dan yang menginap di hotel non bintang jumlahnya lebih banyak, yaitu sebesar 36,01%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Persentase Perbandingan Tamu Asing dan Lokal yang Menginap di Kabupaten Badung Tahun 2000 – 2008

Rata-rata Per Tahun	Perbandingan Tamu yang Menginap (%)			
	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang	
	Asing	Lokal	Asing	Lokal
2000	86,23	13,77	77,54	22,46
2001	84,04	15,96	74,46	25,54
2002	81,66	18,34	76,19	23,81
2003	72,95	27,05	62,88	37,12
2004	73,70	26,30	53,60	46,40
2005	70,80	29,20	56,60	43,50
2006	70,10	29,90	61,39	38,61
2007	74,48	25,53	64,49	35,51
2008	77,09	22,91	63,99	36,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Badung

### 3.4 Kondisi Perhotelan di Kabupaten Badung

Menurut Sarjana (2008) kondisi geografis Kabupaten Badung yang strategis, yaitu sebagai pintu gerbang pariwisata internasional di kawasan Indonesia Timur, turut mendorong pesatnya perkembangan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Badung juga merupakan pusat akomodasi pariwisata di Bali.

Sebagai pusat akomodasi pariwisata, Kabupaten Badung merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, khususnya jasa perhotelan. Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3. Jumlah Hotel dan Akomodasi Yang Ada di Kabupaten Badung Tahun 2004 – 2008

Tahun	Hotel Berbintang		Hotel Non Bintang			Total Kamar
	Jml. Hotel Bintang	Jml. Kamar	Jml. Hotel Melati	Jml. Pondok Wisata	Total Hotel Nonbintang	
2004	90	14.922	309	124	433	8.422
2005	90	14.922	337	143	480	9.057
2006	93	15.288	364	189	553	9.899
2007	94	15.350	377	230	607	10.589
2008	82	14.351	373	392	765	12.099

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

Jumlah hotel berbintang dari tahun 2004 sebanyak 90 buah hotel berbintang terus mengalami peningkatan sampai tahun 2007 menjadi 94 hotel berbintang, kemudian mengalami penurunan menjadi 82 buah hotel pada tahun 2008, antara lain 18 buah untuk hotel bintang dua, 21 buah untuk hotel bintang tiga, 18 buah untuk hotel bintang empat, dan 25 buah untuk hotel bintang lima. Sedangkan untuk jumlah kamar hotel berbintang mengalami penurunan di tahun 2008 apabila dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu dari 15.350 kamar di tahun 2007 menjadi 14.351 kamar di tahun 2008. Sedangkan jumlah kamar untuk hotel non bintang, tahun 2008 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu masing masing sebesar 10.589 kamar di tahun 2007, dan 12.099 kamar di tahun 2008.

Untuk akomodasi lainnya seperti hotel melati, pondok wisata dan rumah kos mengalami variasi peningkatan jumlah hotel maupun penurunan jumlah hotel. Untuk hotel melati, jumlah hotel terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga tahun 2007, yaitu dari 309 buah hotel di tahun 2004 hingga menjadi 377 buah hotel di tahun 2007. Namun di tahun 2008, jumlah hotel melati mengalami penurunan apabila

dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Untuk pondok wisata dan rumah kos, juga mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga tahun 2008, yaitu 124 buah pondok wisata dan rumah kos di tahun 2004 hingga mencapai 392 buah di tahun 2008.

Perkembangan lamanya tamu menginap (hari) di hotel bintang maupun hotel berbintang, baik untuk wisatawan asing maupun wisatawan domestik dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat dari Tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4. Rata-rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang Di Kabupaten Badung Tahun 2000 – 2008

Tahun	Lama Menginap (Hari)			
	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang	
	Wisman	Wisdom	Wisman	Wisdom
2000	4,29	4,37	5,10	4,09
2001	4,31	4,06	5,53	3,34
2002	4,19	3,98	5,79	3,83
2003	3,72	3,56	5,45	2,66
2004	3,54	3,13	4,10	1,92
2005	3,67	3,19	3,62	1,96
2006	4,18	3,66	5,32	4,41
2007	3,60	3,64	4,94	3,21
2008	3,93	3,74	4,37	3,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

Berdasarkan Tabel 3.4. di atas, terlihat bahwa rata-rata lama menginap tertinggi untuk wisatawan asing di hotel berbintang adalah 4,31 hari, yaitu di tahun 2001. Sedangkan rata-rata lama menginap tertinggi untuk wisatawan asing di hotel non bintang adalah 5,53 hari, juga di tahun 2001. Rata-rata menginap terendah untuk wisatawan asing di hotel berbintang adalah 3,60 hari di tahun 2007, sedangkan rata-rata menginap terendah untuk wisatawan asing di hotel nonbintang adalah 3,62 hari di tahun 2005.

Untuk wisatawan domestik, terlihat bahwa rata-rata lama menginap tertinggi untuk wisatawan domestik di hotel berbintang adalah 4,37 hari, yaitu di tahun 2001. Sedangkan rata-rata lama menginap tertinggi untuk wisatawan domestik di hotel non bintang adalah 4,41 hari, juga di tahun 2006. Rata-rata menginap terendah untuk wisatawan domestik di hotel berbintang adalah 3,13 hari di tahun 2004, sedangkan rata-rata menginap terendah untuk wisatawan domestik di hotel nonbintang adalah 1,92 hari di tahun 2004.

### 3.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung

Sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah di Kabupaten Badung. Melihat semakin pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah Pajak Hotel. Adapun perkembangan jumlah Anggaran dan Realisasi Total Pendapatan, Total Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Pajak Hotel Kabupaten Badung selama enam tahun terakhir dari tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 tercantum dalam Tabel 3.5. dan Tabel 3.6. sebagai berikut :

Tabel 3.5. Anggaran Pendapatan, PAD, Pajak Daerah, dan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2004 s/d 2009 (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Pendapatan	Anggaran PAD	Anggaran Pajak Daerah	Anggaran Pajak Hotel
2004	502.522.761.248,00	273.825.571.348,00	249.990.000.000,00	Data tidak tersedia
2005	600.313.173.360,00	348.995.706.650,00	319.270.000.000,00	260.000.000.000,00
2006	624.898.824.321,91	324.299.348.368,91	288.749.804.368,00	222.944.860.000,00
2007	835.168.445.317,03	408.375.462.270,68	370.892.360.000,00	300.000.000.000,00
2008	1.080.269.727.466,86	620.631.469.867,86	571.765.363.935,00	480.000.000.000,00
2009	1.343.412.410.307,68	787.548.976.684,68	730.239.139.532,00	597.500.000.000,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah diolah kembali.  
www.bpk.go.id

Tabel 3.6. Realisasi Total Pendapatan, Total PAD, Total Pajak Daerah, dan Total Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2004 s/d bulan Oktober 2009 (Dalam Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Total PAD	Total Pajak Daerah	Pajak Hotel
2004	573.946.125.840,55	332.316.936.151,55	304.775.603.400,30	211.851.903.300,00
2005	651.739.889.813,11	388.582.725.448,11	350.299.983.913,06	287.167.690.295,48
2006	663.449.008.564,21	362.125.384.693,21	323.034.959.013,43	254.777.886.213,52
2007	977.327.877.391,49	525.089.023.791,14	477.676.223.317,02	392.143.858.896,89
2008	1.253.487.877.519,00	759.801.041.723,00	698.505.086.283,51	579.748.984.366,28
2009	1.145.932.252.573,03	702.476.724.272,03	640.290.701.923,51	524.608.572.686,26

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
www.bpk.go.id

Adapun perkembangan persentase realisasi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pajak Daerah dan persentase realisasi Pajak Hotel terhadap Anggaran Pajak Hotel serta persentase realisasi PAD terhadap Total Pendapatan, persentase realisasi penerimaan

Pajak Daerah terhadap PAD, dan persentase realisasai penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung selama enam tahun terakhir dari tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 3.7. dan Tabel 3.8. sebagai berikut :

Tabel 3.7. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pajak Daerah, dan Realisasi Pajak Hotel terhadap Anggaran Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2004 s/d bulan Oktober 2009 (Dalam Persen)

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>% Realisasi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pajak Daerah</b>	<b>% Realisasi Pajak Hotel terhadap Anggaran Pajak Hotel</b>
2004	121,90	-
2005	109,70	110,45
2006	111,80	114,27
2007	128,70	130,71
2008	122,10	120,78
2009	87,68	87,80

Sumber : BPK RI, telah diolah kembali.

Tabel 3.8. Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan, Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD, dan Realisasi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2004 s/d bulan Oktober 2009 (Dalam Persen)

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>% PAD terhadap Total Pendapatan</b>	<b>% Pajak Daerah terhadap PAD</b>	<b>% Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah</b>
2004	57,90	91,71	69,51
2005	59,62	90,15	81,98
2006	54,58	89,21	78,87
2007	53,73	90,97	82,09
2008	60,61	91,93	82,99
2009	61,30	91,15	81,93

Sumber : BPK RI, telah diolah kembali.

Dari Tabel 3.7. di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi Pajak Hotel selalu dapat melampaui anggaran Pajak Hotel yang telah ditetapkan sebelumnya (kecuali tahun 2009 karena perhitungan realisasi penerimaan Pajak Hotel baru sampai bulan Oktober 2009). Persentase realisasi Pajak Hotel terhadap anggaran Pajak Hotel di tahun 2005 adalah sebesar 110,45%, dan perolehan presentase tersebut meningkat di

tahun 2006 menjadi 114,27%. Di tahun 2007, persentase realisasi Pajak Hotel terhadap anggaran Pajak Hotel kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 130,71%. Akan tetapi, di tahun 2008, persentase realisasi Pajak Hotel terhadap anggaran Pajak Hotel menurun, menjadi sebesar 120,78%.

Sedangkan dari Tabel 3.8. terlihat bahwa Pajak Hotel memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap Pajak Daerah, dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2006 yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2005. Kontribusi pajak hotel terhadap jenis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2004 sebesar 69,51%, pada tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 81,98%, tahun 2006 mengalami sedikit penurunan menjadi 78,87%, tahun 2007 kembali mengalami kenaikan menjadi 82,09%, dan pada tahun 2008 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 82,99%. Meskipun perhitungan penerimaan Pajak Daerah di tahun 2009 baru sampai bulan Oktober, tetapi kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah mencapai 81,93%.

### 3.6 Perekonomian Daerah Kabupaten Badung

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui perubahan PDRB yang terjadi pada setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan yang cukup menggembirakan. Tabel 3.9. akan menyajikan perkembangan PDRB Kabupaten Badung dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008.

Tabel 3.9. Nilai Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2000-2008

Tahun	Harga Konstan (Dalam Jutaan)	Harga Berlaku (Dalam Jutaan)	Pertumbuhan (%)	
			Harga Konstan	Harga Berlaku
2000	1.848.114,57	3.433.683,38	4,91	13,22
2001	1.946.099,04	3.957.524,34	5,30	15,26
2002	2.017.582,75	4.654.769,71	3,67	17,62
2003	2.073.679,82	5.103.630,23	2,78	9,63
2004	4.100.875,14	5.891.231,65	5,78	12,26
2005	4.330.863,41	7.004.646,19	5,61	18,90
2006	4.548.555,63	7.701.192,62	5,03	10,02
2007	4.860.131,69	8.799.215,12	7,05	16,09
2008	5.196.125,34	10.478.390,93	6,91	16,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa PDRB Kabupaten Badung menurut harga konstan pada tahun 2000 nilai absolutnya mencapai Rp1.848.114,57 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 4,91% kemudian terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2008 dengan nilai sebesar Rp5.196.125,34 juta. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun tersebut adalah 6,91%.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Badung ditentukan oleh besarnya peranan sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor. Untuk menggambarkan struktur perekonomian tersebut, maka komposisi pembentukan PDRB yang terdiri dari sembilan sektor/kegiatan usaha kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1) Sektor Primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor penggalian, 2) Sektor sekunder merupakan pembentukan dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan, serta 3) Sektor Tersier, mencakup sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Adapun kontribusi dari masing-masing sektor berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada periode 2004 – 2007, seperti yang terlihat pada Tabel 3.10. sebagai berikut :

Tabel 3.10. Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Badung Tahun 2004 – 2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Sektor	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)
<b>A.</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>361.677,68 8,82</b>	<b>398.937,05 9,21</b>	<b>436.598,78 9,59</b>	<b>443.110,18 9,12</b>
1	Pertanian	355.556,27 8,67	393.611,42 9,09	430.924,17 9,47	437.752,93 9,01
2	Pertambangan dan Penggalian	6.121,41 0,15	5.325,63 0,12	5.674,61 0,12	5.357,25 0,11
<b>B.</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>390.519,38 9,53</b>	<b>403.640,89 9,31</b>	<b>417.884,28 9,19</b>	<b>440.622,02 9,06</b>
3	Industri Pengolahan	123.705,14 3,02	127.886,38 2,95	131.865,12 2,90	138.748,48 2,85
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	64.380,74 1,57	67.227,76 1,55	71.320,02 1,57	77.004,26 1,58
5	Bangunan	202.433,50 4,94	208.526,75 4,81	214.699,14 4,72	224.869,28 4,63
<b>C.</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>3.348.678,08 81,66</b>	<b>3.528.285,47 81,46</b>	<b>3.694.054,57 81,21</b>	<b>3.976.399,49 81,82</b>
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.896.726,35 46,25	1.997.899,08 46,13	2.065.254,75 45,40	2.196.234,96 45,19
7	Pengangkutan dan Komunikasi	981.902,76 23,94	1.030.338,61 23,79	1.091.037,32 23,99	1.223.330,40 25,17
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	121.642,87 2,97	128.725,03 2,97	134.568,06 2,96	137.864,79 2,84
9	Jasa-jasa	348.406,10 8,50	371.322,75 8,57	403.194,44 8,86	418.969,34 8,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

*Sektor Primer*, untuk Kabupaten Badung kontribusi sektor ini di tahun 2004 sebesar 8,82% dengan nilai sebesar Rp361.677,68 juta, terus mengalami kenaikan hingga tahun 2006 sebesar 9,59% dengan nilai sebesar Rp436.598,78 juta, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2007 hingga sebesar 9,12% dengan nilai sebesar Rp443.110,18 juta. Untuk sektor Pertanian, peranannya mengalami sedikit peningkatan dari 8,67% pada tahun 2004 menjadi 9,47% pada tahun 2006, kemudian mengalami penurunan menjadi 9,01% di tahun 2007. Meskipun angkanya masih berada di bawah sektor lainnya tetapi peranannya masih cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Badung.

*Sektor Sekunder*, kontribusi nilai produksi untuk sektor sekunder pada tahun 2004 mencapai sebesar 9,53% dengan jumlah nilai sebesar Rp390.519,38 juta, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2005 yaitu menjadi 9,31%, meskipun secara nilai mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp403.640,89 juta. Kontribusi sektor sekunder mengalami penurunan terus dari persentasenya terhadap PDRB hingga tahun 2007 menjadi sebesar 9,19% akan tetapi dari nilai rupiahnya mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2006 menjadi sebesar Rp440.622,02 juta. Sumbangan terbesar sektor sekunder di tahun 2005 berasal dari sektor bangunan sebesar 4,94% kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 3,02%. Lalu disusul oleh sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 1,57%. Keadaan ini semakin menurun hingga tahun 2007, menjadi sebesar 4,63% untuk sektor Bangunan, 2,85% untuk sektor Industri Pengolahan, dan 1,58% untuk sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Sektor industri Pengolahan peranannya relatif masih kecil yaitu 3,02% pada tahun 2004 dengan kecenderungan menurun menjadi 2,85% pada tahun 2007, hal ini disebabkan karena belum mampu bersaing dengan produk-produk industri kecil dengan produk-produk dari Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Gianyar yang berkembang terlebih dahulu. Namun demikian sektor ini masih tetap mendapat perhatian dan pembinaan intensif dari Pemerintah Kabupaten, mengingat sektor ini cukup potensial dalam penyerapan tenaga kerja terutama kelompok industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang produknya berkaitan dengan kepariwisataan.

*Sektor Tersier*. Merupakan sektor yang paling dominan dengan kontribusi sebesar 81,66% pada tahun 2004 dengan nilai rupiah sebesar Rp3.348.678,08 juta. Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB ini terus mengalami penurunan sampai tahun

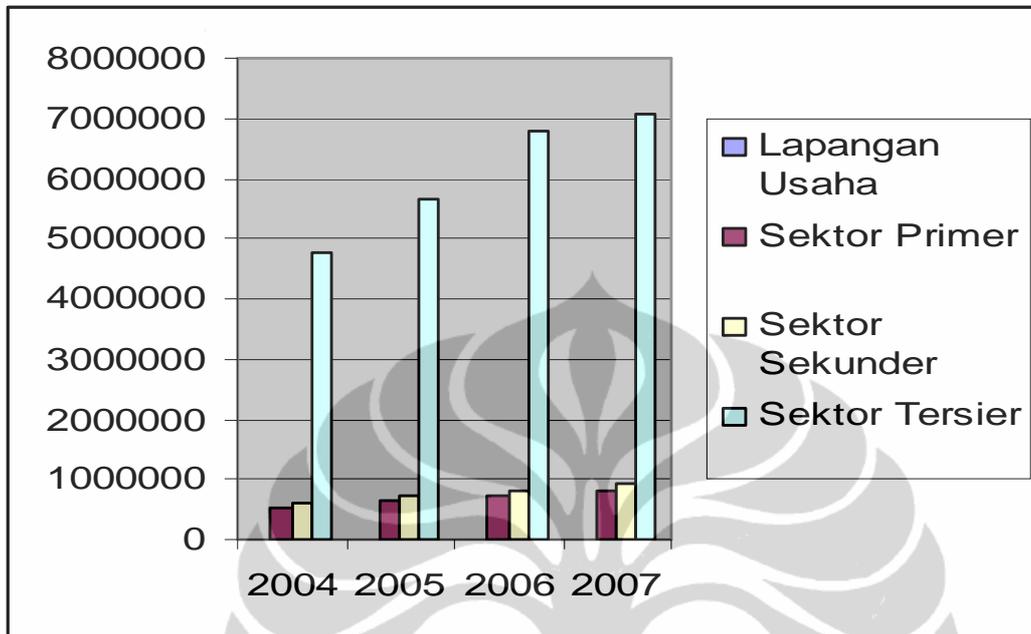
2006. Pada tahun 2007 kontribusinya kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 81,82%, akan tetapi nilai riil nya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai sebesar Rp3.976.399,49 juta pada tahun 2007. Sumbangan terbesar bagi sektor tersier berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 23,94% di tahun 2004, kemudian disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, dimana sektor angkutan udara memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 18,57%. Pada tahun 2004-2007 sumbangan sektor tersier ini mengalami penurunan menjadi sebesar 81,82% di tahun 2007, akan tetapi dari nilai absolutnya terus mengalami peningkatan. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Badung 46,25% di tahun 2004, turun menjadi 46,13% di tahun 2005, tetapi nilai riil-nya mengalami peningkatan, menjadi Rp1.997.899,08 juta di tahun 2005. Namun sumbangan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di Provinsi Bali terus mengalami penurunan, tetapi terjadi peningkatan di sektor Pengangkutan dan Komunikasi dari 23,94% di tahun 2004, dan terus meningkat hingga menjadi 25,17 % di tahun 2007.

Peranan sektor Jasa-jasa terlihat meningkat dari 8,50% pada tahun 2004 menjadi 8,86% untuk tahun 2006, tetapi kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2007 menjadi sebesar 8,62%, dan sumbangannya masih cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Jasa-jasa terdiri dari : jasa pemerintahan umum yang terdiri dari administrasi pemerintahan dan pertanahan serta jasa pemerintah lainnya; jasa dari swasta terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, hiburan, dan rekreasi; serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Sumbangan sektor tersier Kabupaten Badung adalah sebesar 54% terhadap pembentukan PDRB Provinsi Bali sektor tersier. Kondisi ini disebabkan karena Kabupaten Badung memiliki potensi yang sangat mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya sektor tersier tersebut. Di Kabupaten Badung banyak terdapat pusat kegiatan ekonomi, seperti hotel, restoran, perdagangan, pelabuhan udara, serta obyek wisata, dan juga sangat didukung oleh sumber daya manusia dan investasi yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dengan demikian, maka terlihat adanya kecenderungan pergeseran struktur PDRB Kabupaten Badung, yang bergeser dari sektor sekunder yang memperlihatkan kontribusi penurunan secara relatif, mengarah ke sektor tersier yang sebaliknya

mengalami peningkatan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Badung, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2. berikut ini :



Gambar 3.2. Perkembangan Struktur PDRB Kabupaten Badung Tahun 2004–2007 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, telah diolah kembali.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### **4.1 Populasi dan Sampel**

Populasi data dalam penelitian ini adalah seluruh hotel bintang, hotel nonbintang, pondok wisata/villa, dan rumah kos yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, yang memiliki surat ijin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dan melakukan kegiatan usaha selama tahun 2008, yaitu sebanyak 847 unit.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 265 unit, seperti yang terdapat dalam *Table of Sample Size for a Given Population Size* dari Krejcie & Morgan dalam Sekaran (2003), dimana dalam tabel tersebut dinyatakan bahwa untuk ukuran populasi sebesar 800, maka sampel yang diambil adalah sejumlah 260; sedangkan apabila ukuran populasi sebesar 850, maka sampel yang diambil adalah sejumlah 265. Dari jumlah sampel sebanyak 265 tersebut, akan dibagi lagi secara proporsional menurut kelompok hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel melati, pondok wisata/villa, dan rumah kos.

### **4.2 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung dapat diperoleh melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari literatur yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, laporan berkala, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dan wawancara dengan pengelola atau petugas pemungut pajak hotel, para pejabat, dan instansi terkait di Kabupaten Badung guna memperoleh data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### 4.3 Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dilihat dari sifat data ada dua seperti berikut ini :

1. Data Kuantitatif, antara lain :
  - a. Badung Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, sebagai sumber data sekunder untuk mendeskripsikan wilayah penelitian, mendukung analisis, serta argumen yang diuraikan.
  - b. Data tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung, yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung serta dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.
  - c. Data tentang jumlah hotel, dan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
2. Data Kualitatif  
Data yang tidak berupa angka-angka, serta tidak dapat diukur. Misalnya data berupa uraian atau keterangan-keterangan.

### 4.4 Alat Analisis

#### 4.4.1 Potensi, Efektifitas, dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang menggunakan perhitungan matematika sederhana untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel.

Potensi penerimaan pajak umumnya didefinisikan sebagai sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut oleh instansi pemungut pajak, pada periode (tahun) tertentu, berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut atau daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan

daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Kursius, 2004).

Peneliti mengukur potensi pajak hotel, karena selama ini Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung selama ini belum pernah mengukur potensi pajak hotel yang ada di wilayahnya secara mendetail, sehingga dalam kesempatan ini peneliti menggunakan rumus untuk menghitung potensi dengan menggunakan data yang rinci.

Dalam menganalisis potensi pajak hotel, peneliti menggunakan data potensi tahun 2008, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan data, besarnya sumbangan yang diberikan oleh pajak hotel terhadap total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung adalah yang terbesar di tahun 2008 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dengan mempertimbangkan pula pesatnya pertumbuhan usaha akomodasi perhotelan di Kabupaten Badung selama tahun 2008.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak hotel, dapat dihitung dengan menggunakan modifikasi persamaan dari Makhfatih dan Saptono (2010) sebagai berikut :

**Potensi Pajak Hotel = Tarif x (jumlah pembayaran/yang seharusnya dibayar kepada Hotel)**

Kursius (2004) menjabarkan persamaan di atas menjadi persamaan sebagai berikut :

**Potensi Pajak Hotel (PPH)<sub>t</sub> = 10% x  $\left[ \sum_i \sum_j (JK_{ji})_t \times (HK_{ji})_t \times (TPK_{ji})_t \right] \times 365$**

Dimana :

(JK<sub>ji</sub>)<sub>t</sub> = Jumlah kamar tipe j yang dimiliki oleh hotel i pada tahun t;  
 (HK<sub>ji</sub>)<sub>t</sub> = Harga kamar tipe j pada hotel i pada tahun t per malam;  
 (TPK<sub>ji</sub>)<sub>t</sub> = Tingkat pemanfaatan kamar tipe j pada hotel i pada tahun t;  
 365 = Jumlah hari dalam satu tahun.

Kemudian, dalam penelitian ini, persamaan di atas dimodifikasi menjadi :

$$\text{Potensi Pajak Hotel (PPH)t} = 10\% \times \left[ \left\{ \sum_{i=1}^n (JKi)t \times (HKRi)t \times (TPKR)t \right\} \times 365 \right] + \left[ 10\% \left\{ \sum_{i=1}^n (JKi)t \times (HKRi)t \times (TPKR)t \right\} \times 365 \right]$$

Dimana :

- (JKi)t = Jumlah kamar yang dimiliki oleh hotel i pada tahun t;  
 (HKRi)t = Harga kamar rata-rata (dari tarif kamar tertinggi dan tarif kamar terendah) pada hotel i pada tahun t per malam;  
 (TPKR)t = Tingkat pemanfaatan kamar rata-rata per kelas hotel pada tahun t  
 365 = Jumlah hari dalam satu tahun.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah :

1. Komposisi jumlah kamar yang mempunyai tarif terendah dan tarif tertinggi di hotel i adalah sama, yaitu 50 : 50.
2. Harga kamar rata-rata untuk masing-masing hotel adalah (tarif terendah + tarif tertinggi)/2.
3. Tingkat pemanfaatan kamar rata-rata adalah tingkat pemanfaatan kamar rata-rata per kelas hotel.

Hotel/penginapan yang masuk dalam perhitungan potensi pajak hotel adalah hotel/penginapan yang telah memiliki surat ijin usaha dan NPWPD yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung maupun Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, dan perhitungan potensi pajak hotel dihitung dengan menggunakan *sampling*, sehingga tidak semua hotel yang terdaftar di Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dihitung secara satu per satu dalam perhitungan ini.

Untuk dapat mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, maka peneliti menggunakan rumus dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakHotel}}{\text{PotensiPenerimaanPajakHotel}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif.
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif.
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Pada dasarnya perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan tingkat penerimaan (realisasi) pajak hotel tersebut dengan biaya pungut yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tingkat penerimaan pajak hotel tersebut. Rumus untuk menghitung efisiensi yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{BiayaPungutPajakHotel}}{\text{RealisasiPenerimaanPajakHotel}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh besarnya Biaya Pemungutan Pajak Hotel, menggunakan proporsi yang sama besarnya dengan kontribusi yang diberikan oleh realisasi pajak hotel terhadap total realisasi pajak daerah untuk tahun yang sama, yaitu :

Biaya pemungutan pajak hotel = (persentase realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2008 terhadap seluruh realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2008) x (total realisasi biaya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2008)

Sedangkan tingkat klasifikasi efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti tidak efisien.
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti kurang efisien.
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efisien.
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti efisien.
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti sangat efisien.

Efektivitas dan efisiensi diukur sebagai salah satu indikator kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Selama ini, yang melaksanakan pengukuran atas efektivitas dan efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Badung, dan rasio yang digunakan berbeda dengan rasio yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penghitungan potensi, efektifitas, dan efisiensi penerimaan pajak hotel akan menggunakan dua metode, metode pertama adalah menggunakan harga kamar rata-rata untuk masing-masing hotel, dan metode yang kedua adalah dengan menggunakan harga kamar terendah untuk masing-masing hotel.

#### **4.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel**

Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak hotel, perlu juga diteliti faktor-faktor apa saja yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, sehingga dilakukan analisis kuantitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada data historis yang disusun mengikuti urutan waktu (*time series*) serta alat bantu ekonometri, khususnya analisis *multiple regression double ln*, dimana tahun observasinya selama 24 tahun dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2008. Sejumlah faktor diduga

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, yaitu antara lain :(a). Jumlah wisatawan mancanegara (b). Jumlah wisatawan domestik (c). Jumlah kamar hotel (d). Dummy, peristiwa Bom Bali (e). Dummy, krisis moneter.

Penerimaan Pajak Hotel = f {Jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan domestik, jumlah kamar hotel, Dummy1: peristiwa Bom Bali, Dummy2: krisis moneter}

Hubungan di atas dapat ditulis dalam bentuk matematis sebagai berikut :

$$\text{LnY} = \alpha_0 + \beta_1 \text{LnX}_1 + \beta_2 \text{LnX}_2 + \beta_3 \text{LnX}_3 + \beta_4 \text{D}_1 + \beta_5 \text{D}_2 + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Variabel terikat

Y = Penerimaan Pajak Hotel

Variabel bebas

X<sub>1</sub> = Wisatawan mancanegara (wisman)

X<sub>2</sub> = Wisatawan Domestik (wisdom)

X<sub>3</sub> = Jumlah Kamar Hotel (jmlkmr)

D<sub>1</sub> = Dummy 1 Peristiwa Bom Bali (dummy1)

D<sub>2</sub> = Dummy 2 Krisis Moneter (dummy2)

α<sub>0</sub> = Intersep

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>4</sub>, β<sub>5</sub> = Koefisien regresi dari variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>

ε<sub>it</sub> = Variabel pengganggu

Model ini digunakan untuk mengkaji hipotesis yang menyatakan bahwa Jumlah Wisatawan Mancanegara, Jumlah Wisatawan Domestik, Jumlah Kamar Hotel, Dummy 1, dimana D1=1 adalah peristiwa Bom Bali I dan II pada tahun 2003 dan 2006, D2=0 adalah tahun di luar itu, Dummy 2, dimana D2=1 adalah peristiwa krisis ekonomi tahun 1998, 1999, dan 2000, D2=0 diluar peristiwa krisis ekonomi, yang diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung.

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan variabel-variabel berikut sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, adalah :

1. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia, wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, menjadi tulang punggung penggerak sektor pariwisata. Dengan hadirnya wisatawan mancanegara, akan menggerakkan bisnis pariwisata, yang termasuk di dalamnya adalah bisnis perhotelan. Dari wisatawan pulalah hotel-hotel tersebut dapat memberikan kontribusi pajak hotel bagi pemerintah daerah setempat.

Hal ini pun diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa wisatawan mancanegara memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Beberapa penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Silviana (2002) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pajak hotel dan restoran di Kota Bukittinggi periode tahun 1985-1999, Astabrata (2003) yang menganalisis peranan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung periode tahun 1985-1999, dan Suhendi (2008) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta periode tahun 1991-2005.

2. Jumlah Wisatawan Domestik

Meskipun jumlahnya tidak sebanyak jumlah wisatawan mancanegara, wisatawan domestik tetap memegang peranan dalam industri pariwisata. Hal ini pun diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dalam Suhendi (2008) yang menyatakan bahwa jumlah tamu domestik berpengaruh secara positif signifikan terhadap penerimaan sektor perhotelan di D. I. Yogyakarta.

3. Jumlah Kamar Hotel

Hal ini didasarkan atas penelitian Im dan Sakai dalam Silviana (2002) yang menganalisis tingkat pajak ad valorem atas pendapatan bersih perusahaan dan aplikasi pada pajak kamar hotel. Hasil penelitian Im dan Sakai menyimpulkan bahwa pajak kamar hotel dipandang sebagai sumber yang sangat baik untuk

pendapatan pajak. Namun perlu diperhatikan semakin tinggi jumlah pajak atas nilai pada kamar hotel dapat menimbulkan pengaruh negatif pada pendapatan bersih pengelola hotel dan kelangsungan hidup keuangan industri. Sebenarnya, faktor yang paling tepat diduga mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah harga sewa kamar hotel. Tetapi dengan banyaknya hotel yang ada, sedemikian bervariasinya harga sewa kamar hotel, serta data harga sewa kamar hotel tersebut terbatas, yaitu hanya di tahun 2008, menjadi sulit untuk menggunakan variabel harga sewa kamar hotel sebagai salah satu variabel yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

4. *Dummy*, Peristiwa Bom Bali

Peristiwa Bom Bali memberikan dampak yang besar bagi sektor pariwisata di Indonesia. Dengan adanya peristiwa Bom Bali ini, baik yang terjadi di tahun 2002 maupun 2005, menyebabkan negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia sempat mengeluarkan *travel warning* atau larangan bepergian, ke Indonesia bagi warga negaranya, karena dianggap suasana di Indonesia tidak kondusif. Tentunya peristiwa ini akan sangat memukul industri pariwisata yang banyak tergantung kepada kedatangan/kunjungan wisatawan mancanegara.

5. *Dummy*, Krisis Moneter

Dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia tahun 1998-2000, diperkirakan akan melemahkan daya beli para wisatawan, sehingga sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, khususnya di Kabupaten Badung.

Untuk menguji model tersebut, menggunakan Uji Kriteria Statistik :

1. Analisis Determinasi ( $R^2$ )

Merupakan suatu ukuran *goodness of fit*. Digunakan untuk mencari kesesuaian model dimana variabel indeoenden secara bersama-sama menerangkan variabel dependen.

2. Analisis t-test

Digunakan untuk melihat signifikansi dari semua variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri (*individual test*).

### 3. Analisis F-test

Digunakan untuk melihat signifikansi dari semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (*overall test*).

### 4. Durbin-Watson Stat (DW-Stat)-test / *Correlogram of Residuals*

Digunakan untuk melihat *Autocorrelation*, suatu keadaan dimana terjadi korelasi antar data-data yang disusun mengikuti urutan waktu (*time series*) atau *cross section*, yang ditunjukkan dengan nilai Durbin Watson sebesar angka 2, berarti terletak di daerah tidak ada masalah *autocorrelation*.

Secara ringkas, tujuan penelitian beserta metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1. Ringkasan Tujuan Penelitian dan Metodologi yang Digunakan

No.	Tujuan Penelitian	Metodologi
1.a.	Potensi Penerimaan Pajak Hotel	$= 10\% \times [ \{ \sum_i (JK_i)_t \times (HKR_i)_t \times (TPKR)_t \} \times 365 ]$ $+ [ 10\% [ \{ \sum_i (JK_i)_t \times (HKR_i)_t \times (TPKR)_t \} \times 365 ] ]$
b.	Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel	Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$
c.	Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel	Efisiensi = $\frac{\text{Biaya Pungut Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$
2.	Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel	$\ln Y = \alpha_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 D_1 + \beta_5 D_2 + \varepsilon_{it}$

Sumber : Bab 1.

Selain menggunakan metode analisis kuantitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif, terutama untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel yang selama ini terjadi di Kabupaten Badung, serta memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Badung tentang bagaimana mekanisme pemungutan pajak, terutama pajak hotel, yang lebih baik dari sebelumnya, agar dapat memberikan pendapatan asli daerah terutama dari pajak hotel yang lebih baik lagi bagi Kabupaten Badung.